

LAMPUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



Jl. Tulp No. 2 Way Mengaku - Liwa - Lampung Barat
Telp. (0728) 21164 - Fax. (0728) 21164
Kode Pos 34811

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab kepada bupati.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Tupoksi yang ada, dengan maksud antara lain sebagai pedoman operasional perangkat daerah serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan tantangan global yang membutuhkan keterbukaan dan transparan kinerja pemerintah.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Disamping itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PerubahanRKPD).

Perubahan dalam Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat "Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat".

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2025.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. LatarBelakang
- b. LandasanHukum
- c. Maksud danTujuan
- d. SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maupun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 yang dilaksanakan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 6 (enam) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 untuk belanja sebesar **Rp.**

7.734.764.867,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar **Rp. 1.061.306.685,-** (*satu milyar enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) atau **13,72** persen, belum optimalnya penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan penataan anggaran dan perubahan target kinerja pada beberapa sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara rinci perubahan belanja dalam Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada lampiran II Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, secara garis besarnya perubahan rencana kerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran belanja pada RKPDP/Renja Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 8.695.647.368,- (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
2. Jumlah anggaran belanja pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 7.734.764.867,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
3. Jumlah sub kegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2025 dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebanyak 0 (0) sub kegiatan.
4. Jumlah sub kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2025 dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebanyak 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.
5. Jumlah sub kegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan Tahun 2025 dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebanyak 0 (0) sub kegiatan.
6. Jumlah subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebanyak 0 (0) sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 sesuai dengan tujuan, sasaran serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lampung Barat.


Penyusunan rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat dan pembahasan bersama seluruh unsur pimpinan dan pelaksana kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mengusulkan adanya perubahan anggaran yang semula pada APBD Murni 2025 sebesar **Rp. 7.734.764.867,-** diusulkan perubahan menjadi **Rp. 6,917,747,867,-** atau terjadi pengurangan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar **Rp. 817.017.000,-**.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA AKHIR TAHUN 2026 | REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 | TARGET KINERJA DPA TAHUN 2025 | REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 | | CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 | | | |
|------|--|---|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | | REALISASI KINERJA RENJA | REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) | REALISASI TARGET | REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 = 5+7 | 10 = 9/4 | | |
| 8 | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol | 76,45 Poin | 78,2 Poin | 75,85 Poin | 78,20 Poin | 78,20 Poin | 75,85 Poin | 75,85 Poin | |
| 8 | 01 | 01 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | 38 Dokumen | 22 Dokumen | 11 Dokumen | 5 Dokumen | 45,45 % | 27 Dokumen | 0,71 % | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun | 20 Dokumen | 8 Dokumen | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 25,00 % | 9 Dokumen | 0,45 % | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah | 48 Dokumen | 28 Dokumen | 14 Dokumen | 3 Dokumen | 21,43 % | 31 Dokumen | 0,65 % | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38 Dokumen | 22 Dokumen | 11 Dokumen | 5 Dokumen | 45,45 % | 27 Dokumen | 71,05 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,00 % | 3 Dokumen | 75,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | - % | 2 Dokumen | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | - % | 2 Dokumen | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumePerubahan DPA-SKPD | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | - % | 2 Dokumen | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 laporan | 4 laporan | 2 laporan | 0 laporan | - % | 4 laporan | 50,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---|-------|---------|-------|---|
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48 | laporan | 24 | laporan | 12 | laporan | 3 | laporan | 25,00 | % | 27 | laporan | 56,25 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 | Orang | 32 | Orang | 18 | Orang | 18 | Orang | 25,00 | % | 50 | Orang | 89,29 | % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | Dokumen | 2 | Orang | 1 | Orang | 0 | Dokumen | - | % | 2 | Orang | 50,00 | % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 8 | Dokumen | 4 | Orang | 2 | Orang | 0 | Dokumen | - | % | 4 | Orang | 50,00 | % |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8 | Dokumen | 4 | Orang | 2 | Orang | 0 | Dokumen | - | % | 4 | Orang | 50,00 | % | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 | Orang | 32 | Orang | 18 | Orang | 18 | Orang | 25,00 | % | 50 | Orang | 89,29 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | - | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 8 | Dokumen | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | - | % | 4 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8 | Dokumen | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | - | % | 4 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 25,00 | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 25,00 | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 25,00 | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| | | | | | | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya | 24 | Orang | 0 | Orang | 4 | Orang | 0 | Orang | - | % | 0 | Orang | - | % |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 25,00 | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya | 24 Orang | 0 Orang | 4 Orang | 0 Orang | 0 % | 0 Orang | - % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | 4 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 0 Paket | 25,00 % | 2 Paket | 50,00 % |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan | 8 Paket | 4 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 25,00 % | 5 Paket | 62,50 % |
| | | | | | | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan | 28 Dokumen | 13 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 25,00 % | 20 Dokumen | 71,43 % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | 4 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 0 Paket | 25,00 % | 2 Paket | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan | 8 Paket | 4 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 25,00 % | 5 Paket | 62,50 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan | 28 Dokumen | 13 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 25,00 % | 20 Dokumen | 71,43 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 72 Unit | 9 Unit | 6 Unit | 0 Unit | - % | 9 Unit | 12,50 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 7 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 % | 0 Unit | - % |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 36 Unit | 8 Unit | 6 Unit | 0 Unit | 0 % | 8 Unit | 22,22 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 36 Unit | 1 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 % | 1 Unit | 2,78 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 25,00 % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 48 Unit | 27 Unit | 14 Unit | 5 Unit | 35,71 % | 32 Unit | 66,67 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 12 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 25,00 % | 17 Unit | 85,00 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 Unit | 13 Unit | 8 Unit | 0 Unit | 25,00 % | 13 Unit | 54,17 % |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 4 Unit | 2 Unit | 1 Unit | 0 Unit | - % | 2 Unit | 50,00 % |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan | 95 % | 80 % | 85 % | 80 % | 80,00 % | 80,00 % | 84,21 % |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2000 Orang | 150 Orang | 100 Orang | 0 Orang | - % | 150 Orang | 7,50 % |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1004 Orang | 180 Orang | 100 Orang | 0 Orang | - % | 180 Orang | 17,93 % |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Kediatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 16 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | - % | 0 laporan | - % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 % | 2 Dokumen | 66,67 % | |
| | | | | | Jumlah Paskibra | 150 Orang | 50 Orang | 50 Orang | Orang | 40,00 % | 50 Orang | 33,33 % | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2000 Orang | 150 Orang | 100 Orang | 0 Orang | - % | 150 Orang | 7,50 % |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1004 Orang | 180 Orang | 100 Orang | 0 Orang | - % | 180 Orang | 17,93 % |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 16 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | - % | 0 laporan | - % |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 % | 3 Dokumen | 100,00 % |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Pembentukan Paskibra | Jumlah Paskibra | 150 Orang | 100 Orang | 50 Orang | 0 Orang | 40,00 % | 100 Orang | 66,67 % |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat | 72 % | 70 % | 70 % | 69 % | 69,00 % | 69 % | 95,83 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|---|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|---|
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1982 | Orang | 425 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 50,00 | % | 425 | Orang | - | % | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1880 | Orang | 370 | Orang | 180 | Orang | 0 | Orang | 0,00 | % | 370 | Orang | 19,68 | % | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 40 | Laporan | 20 | Laporan | 8 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | % | 20 | Laporan | 50,00 | % | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1982 | Orang | 425 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 50,00 | % | 425 | Orang | - | % |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1880 | Orang | 370 | Orang | 180 | Orang | 0 | Orang | - | % | 370 | Orang | 19,68 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---|---------|---|---|-----|---------|-------|---|
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 40 | Laporan | 20 | Laporan | 8 | Laporan | 0 | Laporan | - | % | 20 | Laporan | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif | 70 | % | 55 | % | 60 | % | 0 | % | - | % | 55 | % | 78,57 | % |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | - | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 540 | Orang | 176 | Orang | 135 | Orang | 0 | Orang | - | % | 176 | Orang | 32,59 | % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 362 | laporan | 0 | laporan | 1 | laporan | 0 | laporan | - | % | 0 | laporan | - | % |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 4 | Dokumen | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | - | % | 2 | Dokumen | 50,00 | % |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 540 | Orang | 176 | Orang | 135 | Orang | 0 | Orang | - | % | 176 | Orang | 32,59 | % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 362 laporan | laporan | 1 laporan | 0 laporan | % | 0 laporan | - % |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA | Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat | 74 % | 72 % | 71 % | 71 % | - % | 71,00 % | 95,95 % |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - % | 0 Dokumen | - % |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4400 Orang | 80 Orang | 50 Orang | 0 Orang | - % | 80 Orang | 1,82 % |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2000 Orang | 190 Orang | 40 Orang | 0 Orang | - % | 190 Orang | 9,50 % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | - % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - % | 0 Dokumen | - % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|---------|
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4400 Orang | 80 Orang | 50 Orang | 0 Orang | - % | 80 Orang | 1,82 % |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2000 Orang | 190 Orang | 40 Orang | 0 Orang | - % | 190 Orang | 9,50 % |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 0 laporan | - % | 2 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat | 100 % | 100 % | 100 % | 56 % | 56,00 % | 56 % | 56,00 % |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 400 Orang | 50 Orang | 200 Orang | 0 Orang | - % | 50 laporan | 12,50 % |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 44 laporan | 22 laporan | 11 laporan | 0 laporan | - % | 22 laporan | 50,00 % |

| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 16 Dokumen | 7 Dokumen | 4 Dokumen | 2 laporan | 50,00 % | 9 laporan | 56,25 % |
|---|----|----|------|----|--|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|---------|
| 8 | 01 | 06 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 400 Orang | 50 Orang | 200 Orang | 0 Orang | - % | 50 Orang | 12,50 % |
| 8 | 01 | 06 | 2.02 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 44 laporan | 22 laporan | 11 laporan | 0 laporan | - % | 22 laporan | 50,00 % |
| 8 | 01 | 06 | 2.02 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 16 Dokumen | 7 Dokumen | 4 Dokumen | 2 laporan | 50,00 % | 9 Dokumen | 56,25 % |



 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197109241998031005

LAMPIRAN II
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|---|--|--|---|---|---|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|--------------------------|---|--|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | TARGET 2025 | | | PAGU INDIKATIF (Rp.) | | | ALASAN PERUBAHAN | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp.) | | | | |
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | RENJA MURNI | APBD MURNI | PERUBAHAN RENJA | RENJA MURNI | | | | APBD MURNI | PERUBAHAN RENJA | | | | NASIONAL | DAERAH | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | 8.685.647.368 | 7.734.784.887 | 6.917.747.887 | | | | | | | | | 7.383.302.357 | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 8.685.647.368 | - | 6.917.747.887 | | | | | | | | | 7.383.302.357 | |
| 8 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol | 7625% | 7625% | 7625% | 2.727.841.300 | 2.472.298.796 | 2.327.070.296 | | | | | | | | 7625% | 2.988.988.188 | |
| 8 01 01 201 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen 11 Dokumen 12 Dokumen | 5 Dokumen 11 Dokumen 12 Dokumen | 5 Dokumen 11 Dokumen 12 Dokumen | 83.043.000 | 37.130.000 | 10.854.000 | | | | | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 44.454.500 | |
| 8 01 01 201 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 19.221.000 | 19.726.500 | 1.808.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 19.368.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.253.000 | 2.922.500 | 1.436.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 3.392.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.177.000 | 1.860.000 | 912.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.469.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.183.000 | 2.732.500 | 1.340.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.320.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.177.000 | 1.764.000 | 877.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.138.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.112.000 | 2.932.500 | 1.440.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 3.782.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 201 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.820.000 | 6.186.000 | 3.043.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 10.968.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Trifurulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trifurulan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Trifurulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trifurulan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 17 Orang | 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 17 Orang | 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 17 Orang | 2.001.283.000 | 2.047.888.196 | 2.044.158.196 | | | | | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.048.888.288 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------|--|--|----------|--|---------------|-----------------------------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 1.991.000.000 | 2.040.399.196 | 2.040.399.196 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.040.399.196 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.900.000 | 2.700.000 | 1.339.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.900.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.705.000 | 2.172.000 | 1.068.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.842.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.578.000 | 2.729.000 | 1.354.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 2.548.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.072.000 | 7.058.000 | 1.388.000 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 16.800.000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.072.000 | 7.058.000 | 1.399.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 16.500.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kewarganegaraan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Dokumen 6 Orang | 1 Dokumen 6 Orang | 1 Dokumen 6 Orang | 28.991.000 | 22.348.500 | 20.273.000 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 37.840.000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.061.000 | 8.346.500 | 6.273.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 15.640.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | 6 Orang | 6 Orang | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 22.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | 7 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket | 7 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket | 7 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket | 185.231.000 | 129.744.800 | 74.559.800 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 275.686.900 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 4.415.000 | 2.410.900 | 2.410.900 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 5.377.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 22.700.000 | 15.500.000 | 7.750.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 33.275.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7.020.000 | 7.020.000 | 7.020.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur | | 9.024.900 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Facilities Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.198.000 | 6.174.000 | 6.174.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 9.150.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 152.900.000 | 86.640.000 | 51.205.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 218.800.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 22 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 81.337.800 | 4.800.000 | 4.800.000 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 178.744.700 | | |
| 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | | 43.400.000 | | | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 23.400.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 42.356.700 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | 43.137.800 | | | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 112.999.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 78.510.700 | 73.330.700 | 58.711.700 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 187.590.000 | | |
| 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 2.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.140.000 | 19.920.000 | 19.920.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 21.960.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.370.700 | 51.410.700 | 36.791.700 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 173.030.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 12 Unit | 12 Unit | 12 Unit | 281.402.800 | 149.889.800 | 112.314.600 | | | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 199.682.800 | | |
| 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penjaminan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penjaminannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penjaminannya | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 43.600.000 | 98.600.000 | 61.025.000 | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 94.650.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 11.202.800 | 7.114.600 | 7.414.600 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Way Mengelu | DANA ALOKASI UMUM (DALU) | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 10.512.800 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 206.400.000 | 43.695.000 | 43.695.000 | Kab. Lampung Barat, Baik Bukti, Semua Kaw/Dasa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Baik, Aman dan | Aparatur | 94.500.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan | Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan | 80% | 90% | 90% | 1.581.608.088 | 1.089.482.818 | 948.236.218 | | | | | | 90% | 1.138.553.018 | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|--|---|--|---------------|---------------|-------------|--|--|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 4 Laporan 261 Orang 500 Orang 1 Dokumen | 50 Orang 100 Orang 100 Orang 1 Dokumen | 50 Orang 50 Orang 100 Orang 1 Dokumen | 1.581.608.088 | 1.089.482.818 | 948.236.218 | | | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan, kader pekon | | 1.138.553.018 | | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 500 Orang | 100 Orang | 50 Orang | 60.120.000 | 62.256.600 | 39.340.500 | | | Efisiensi Anggaran | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan | 61.537.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 251 Orang | 100 Orang | 50 Orang | 185.627.000 | 58.417.000 | 31.688.620 | | | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan | 72.982.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 4 Laporan | | | 29.669.000 | | | | | | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepastibrakan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 305.297.000 | 218.433.000 | 200.753.000 | | | Efisiensi Anggaran | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan | 233.488.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembentukan Pasikbraka | Jumlah Pasikbraka | Jumlah Pasikbraka | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 870.574.188 | 752.386.016 | 676.474.218 | | | Efisiensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DAU YANG DITENTUKAN PENGLUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Aparatur Pemerintah pusat/desa/kab/kota, Aparatur Pelemb, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggal pembangunan | 750.686.016 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|--|---|--|--|-------------|-----------------------------------|
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 135 Orang | 135 Orang | 65 Orang | 429.751.000 | 431.751.000 | 307.139.000 | Eksensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Ormas/SM | 439.604.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 69.095.000 | 27.000.000 | 11.710.000 | Eksensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Ormas/SM | 35.435.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat | Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat | 73% | 73% | 73% | 579.106.500 | 405.531.400 | 235.388.000 | | | | | | 73% | 408.278.200 | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | 4 Laporan 500 Orang 1100 Orang | 4 Laporan 50 Orang 40 Orang | 4 Laporan 25 Orang 25 Orang | 579.106.500 | 405.531.400 | 235.388.000 | | | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon | | 408.278.200 | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | 1100 Orang | 50 Orang | 25 Orang | 364.161.300 | 191.646.200 | 99.071.400 | Eksensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon | 184.704.600 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | 500 Orang | 40 Orang | 25 Orang | 130.998.000 | 130.909.000 | 64.558.000 | Eksensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon | 130.899.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperayaan di Daerah | 4 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 83.977.200 | 82.977.200 | 72.736.600 | Eksensi Anggaran | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, bertudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Bertudaya | Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon | 82.703.600 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

